BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Sebagai agama wahyu terakhir yang diturunkan Allah ke dunia ini, Islam merupakan suatu ajaran yang mempunyai sifat universal. Islam tidak hanya membawa aqidah keagamaan yang benar semata-mata atau ketentuan akhlak yang menjadi dasar masyarakat semata-mata, melainkan membawa pula syari'at yang jelas dan adil. (M. Yusuf Musa, 1991 : 23). Sifat keuniversalan agama Islam ini diantaranya dapat terlihat pada kesempurnaan sistem hukumnya. Di mana hukum Islam sebagai suatu sistem hukum mempunyai watak dan ciri khas yang menonjol, yaitu bersifat lengkap dan sempurna. (TM. Hasbi ash Shiddieqy, 1988 : 105). Hal ini dapat dipahami dari maksud yang terkandung dalam firman Allah :

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab". (Al-Qur'an, 6 : 38).

Sehingga tidaklah berlebihan apabila ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang komplit dan sempurna. (Marcel A. Boisard, 1980 : 187).

Berangkat dari kesempurnaan dan kelengkapan hukum Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa norma norma hukum dalam Islam mencakup tentang urusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenegaraan beserta sistem pemerintahan yang terkait didalamnya. (Abdul Karim Zaidan, 1987: 126). Artinya, syari'at Islam juga menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan pemerintahan karena terselenggaranya suatu pemerintahan dikalangan masyarakat muslim menjamin tegaknya syari'at Islam itu sendiri.

Berkaitan dengan masalah kenegaraan dan pemerintahan, dalam Islam dikenal suatu prinsip bahwa pada hakikatnya negara atau kekuasaan adalah kepunyaan Allah. (H. Rahmat Djatnika, 1987: 177). Maksudnya , pemegang kekuasaan atas alam semesta adalah Allah . Dialah raja yang sebenarnya, yang berkuasa atas langit dan bumi. (A. Shalaby, 1988: 20). Atau dengan perkataan lain, dalam Islam terdapat suatu prinsip bahwa kedaulatan de jure merupakan milik Allah yang kedaulatan de faktonya terbukti dalam penyelenggaraan semesta alam. (Abul A'la al-Maududi, 1990: 243). Kemudian Allah memberikan sebagian dari kekuasaan-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya, sebagai khalifah-Nya (vicegerent of the supreme ruler) untuk mengelolah bumi ini. (KH. Sjehul Hadi Permono, 1993 : 67). Sebagaimana firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi." (Qur'an, 6: 165).

Dan dalam firman-Nya yang lain ditegaskan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والله يؤتي ملكه من يشاء

"Dan Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki." (Qur'an, 2: 247).

Juga dalam ayat yang lain disebutkan :

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض

"Dialah yang menetapkan kamu menjadi khalifah dimuka bumi." (Qur'an, 35: 39).

Berangkat dari prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Allah, yang kemudian mendelegisir kekuasaan mengurus bumi ini kepada manusia. Manusia (rakyat) ini kemudian memilih salah seorang diantara mereka yang mempunyai kemampuan (ahli) untuk menjadi pemimpin. Jadi menurut Islam pemimpin adalah mandataris seluruh rakyat yang menerima delegasi kekuasaan (khalifah) dari Allah. (KH. Sjechul Hadi Permono, 1993: 78). Oleh karenanya seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memberi mandat dan bertanggung jawab kepada Allah, selaku khalifah Allah, atas segala tindakannya, karena prinsip pertanggungjawaban ini termasuk prinsip penting dalam wawasan Islam. (M. Amien Rais, 1989: 56). Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. :

كلكم راع فمسئول عن رعيته

"Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya." (HR. Bukhari-Muslim,

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa menurut pandangan Islam pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan semua kebijaksanaan yang diambil. Ia selaku khalifah Allah menanggung amanat dari Allah dan selaku khalifa khala'ifillah menanggung amanat dari seluruh rakyatnya. (KH. Sjechul Hadi Permono, 1993: 3). Dari sini terlihat bahwa sistem politik yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara mengandung asas demokratik, yakni dengan adanya hak pada rakyat negara Islam untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara. (S. Toto Pandoyo, 1981: 68).

Sehubungan dengan anggapan diatas, maka dalam realitas kehidupan politik di Indonesia tercermin pula adanya pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan, disamping pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dimana Indonesia sebagai negara demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai falsafah Pancasila, mempertegas pengakuan tersebut, yaitu dengan didasarkan pada integritas sila pertama Pancasila sebagai sila ketuhanan kedalam sila keempat Pancasila, yang dikenal sebagai sila kerakyatan. Disamping itu juga didasarkan pada pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, alinea ketiga. Sehingga H. Amirmachmud merumuskan demokrasi Pancasila sebagai kerakyatan yang didasarkan dan dibimbing oleh pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa yang terwujud dalam kesadaran keagamaan yang tinggi. (H. Amirmachmud, 1987: 82).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berdasar atas adanya pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan disamping pengakuan terhadap kedaulatan rakyat ini, maka pemerintah yang berkuasa dalam menjalankan roda pemerintahannya dituntut untuk selalu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik terhadap rakyat maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, segala tindakan serta keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. (A.W. Widjaya, 1984: 30).

Berdasarkan hasil penelitian sementara diatas, maka dapat diasumsikan bahwa prinsip pengakuan kedaulatan rakyat yang merupakan pendelegasian dari kekuasaan tertinggi, yaitu kedaulatan Tuhan, yang pada gilirannya menuntut pertanggungjawaban dua arah terhadap pemerintah, yaitu bertanggung jawab kepada rakyat dan sekaligus secara moral bertanggung jawab kepada Tuhan, yang dikenal dalam sistem Hukum Islam juga dikenal dalam realitas kehidupan politik di Indonesia. Akan tetapi sampai sejauh mana persamaan dan perbedaan yang terdapat didalam kedua sistem hukum tersebut, masih diperlukan penelitian yang mendalam tentang masalah ini.

Urgensi penelitian tentang masalah diatas kian terasa setelah dalam kepustakaan tidak dijumpai kajian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus tentang masalah ini. Disamping itu penelitian ini akan bermanfaat bagi penyusunan program pembinaan agama dan pendidikan politik di Indonesia.

B. Identifikasi masalah

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah : "Pertanggung jawaban pemerintah yang berkuasa menurut Undang-Undang Dasar 1945. Agar menjadi jelas, perlu dikaitkan dengan hukum Islam yang menjadi pedoman hidup mayoritas bangsa Indonesia, atau dengan kata lain, Tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945.

C. Pembatasan masalah

Masalah : "Tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945", ini merupakan rumusan masalahnya.

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945.

E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, - maka tujuan studi ini ialah :

1. Mengetahui tentang pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menetapkan pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesuai atau tidak menurut hukum Islam.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, minimal untuk dua hal, yaitu :

1. Dari segi teoritis dapat dijadikan tambahan perbendaharaan ilmu pengetahuan, diantaranya sebagai landasan teori bagi penelitian selanjutnya yang menyangkut masalah-masalah hak dan kewajiban politik pada umumnya, baik sebagai bahan perbandingan maupun sebagai kerangka dasar dalam menganalisa pertanggungjawaban pemerintah dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia.
2. Dari segi terapan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk merumuskan program pembinaan kehidupan bera -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gama dan pembinaan hukum, juga untuk bahan untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia.

G. Metodologi

1. Data yang akan dihimpun.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara global terdiri dari :

a. Sistem Demokrasi Pancasila.
b. Bentuk negara menurut Islam.
c. Pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang - Undang Dasar 1945.

2. Sumber data.

Dari data-data yang bersifat global di atas maka dapat dipahami bahwa dalam studi ini seluruh data yang diperlukan bersumber pada literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas yaitu :

a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum positif di Indonesia.
   - Bintan R. Saragih, SH, Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
   - Bahan penataran dan bahan referensi penataran UUD 1945, P-4, GBHN, Tap-Tap MPR 1988, Pidato

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, bahan bahan penataran dan bahan referensi penataran UIP Perwajahan : S.E.S, Jakarta, 1988.

- H. Amirmachmud, Pembangunan politik dalam negeri Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Mashuri Maschab, Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- M. Taopan, Drs, Demokrasi Pancasila; Analisa konsepsi aplikasi, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- S. Pamuji, Prof, Drs, MPA, Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- S. Toto Pandoyo, S.H, Ulasan terhadap beberapa ketentuan UUD 1945; Sistem politik dan perkembangan kehidupan demokrasi, Liberty, Yogyakarta, 1981

b. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam.

- Abul A'la al-Maududi, Sistem politik Islam, Mizan, Jakarta, 1990.
- Abdul Karim Zaidan, Dr, Politik Islam; Konsepsi dan dukomentasi, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- A. Shalaby, Prof, Dr, Prinsip pemerintahan Islam, Salim Nabhan, Surabaya, 1988.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya Departemen Agama RI, Jakarta, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- H. Munawir Syadzali, MA, Islam dan tata negara UI Pres, Jakarta, 1990.
- H.M. Daud Ali, Prof, SH, Islam untuk disiplin ilmu hukum; Sosial dan politik, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- K.H. SJechul Hadi Permono, Prof, Dr, S.H, MA,- Pemerintahan Republik Indonesia sebagai pengelola zakat, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993.
- Muhammad S. El-Wa, Sistem politik dalam pemerintahan Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
- M. Amin Rais, Dr, Cakrawala Islam; Antara cita dan fakta, Mizan, Bandung, 1990.
- Muhammad Asad, Sistem pemerintahan Islam, Pustaka, Bandung, 1985.
- M. Yusuf Musa, Prof, Dr, Politik dan negara dalam Islam, Pustaka LSI, Yogyakarta, 1991.

3. Tekhnik penggalian data.

Dari sumber data pokok yang dijadikan acuan dan landasan teori di atas, dapat diketahui bahwa seluruh data yang diperlukan dalam studi ini bersumber pada literatur-literatur yang membahas masalah-maslah yang berkaitan erat dengan studi ini. Dengan demikian tekhnik penggalian data yang dipakai dalam studi ini adalah studi kepustakaan atau telaah pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode analisis data

Data-data dari buku-buku literatur yang direncanakan akan dianalisis secara kualitatif, dengan tahap sebagai berikut :

1. Pengelolaan data dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
2. Pengorganisasian data, guna memperoleh perumusan diskrepsi, yaitu tentang pertanggungjawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945.
3. Penemuan hasil, yaitu mengadakan analisa lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan dalil, kaidah-kaidah teori dan sebagainya, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu dengan menggunakan metode antara lain :
   a. Metode diskreptif, yaitu menggambarkan ketentuan ketentuan yang ada baik tentang pertanggungjawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 maupun tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum Islam.
   b. Metode deduktif, yaitu mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan untuk mengeta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahui hal-hal khusus, yakni dapat diketahui antara pertanggungjawaban pemerintah di Indonesia dan pertanggungjawaban pemerintah menurut hukum Islam yang mempunyai aturan tersendiri.

c. Metode komparatif, yaitu meneliti hubungan beberapa data yang diperoleh kemudian membandingbandingkan kedua data tersebut, khususnya dari segi pertanggungjawabannya, kemudian dirumuskan kesimpulannya.

I. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami dalam mempelajari skrepsi ini maka sistematikanya dibagi beberapa bab yang setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dideskrepsikan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini memberi gambaran secara global dalam proses mencari kebenaran yang berkaitan dengan studi ini, yaitu apa yang meliputi permasalahan dan tujuan dari studi ini yang meliputi metode, pengumpulan data dan unsur untuk apa yang meliputi kegunaan studi ini.

Bab kedua, babini berisi tentang awal pembahasan yaitu, tentang tinjauan umum teori-teori yang digunakan untuk pembahasan obyek penelitian ini, meli-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puti :

A. Tinjauan umum tentang negara dalam Islam yang meliputi konsep negara Islam, dasar dan tujuannya.

B. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam Islam, yang meliputi sumber kekuasaan dalam Islam serta pertanggungjawabannya. Bab ini merupakan landasan teoritis yang dapat dijadikan landasan dan pendekatan untuk melakukan analisis pada bab berikutnya.

Bab ketiga, dalam bab ini dibahas tentang obyek pembahasan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah dan pertanggungjawabannya menurut Undang-Undang Dasar 1945, meliputi :

A. Indonesia adalah negara Demokrasi yang menganut sistem demokrasi Pancasila.

B. Hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Bab keempat, bab ini merupakan penyajian data dan juga sekaligus analisnya yaitu tentang pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 di tinjau dari segi hukum Islam.

Bab kelima, bab ini merupakan suatu kesimpulan sebagai hasil akhir yang ditarik dari pemahaman dalam bab keempat yang menjadi jawaban permasalahan skrepsi ini. Pengalaman serta kesan-kesan selama penelitian dapat dijadikan saran-saran kepada pembaca dalam bab ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id